

Analisis Potensi Penerapan Kebijakan Capital Charge pada Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan) = Analysis of the Potential for Implementing Capital Charge Policy in the Management of State Property (Case Study at the Directorate General of State Assets Management Ministry of Finance)

Boris Satriyo Utomo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920537467&lokasi=lokal>

Abstrak

Salah satu isu krusial dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah tidak dipergunakannya BMN secara efisien sehingga menimbulkan kondisi BMN yang *unutilized* dan *underutilized*. Konsep *capital charge* dalam ranah pengelolaan aset publik dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. *Capital charge* telah diimplementasikan pada beberapa negara antara lain Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Kanada. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan diterapkannya konsep *capital charge* pada pengelolaan BMN dan prasyarat yang harus dipenuhi untuk penerapan *capital charge* tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). DJKN merupakan unit pemerintah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan BMN, termasuk kebijakan *capital charge*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *capital charge* memiliki relevansi dengan konsepsi pengelolaan BMN, terutama pada optimalisasi pengelolaan BMN dengan fokus *cost efficiency* pada kondisi BMN yang *underutilized*. Berdasarkan hal tersebut, *capital charge* sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia, namun dalam implementasinya juga perlu memperhitungkan dampak fiskal dari sudut pandang penganggaran keuangan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

.....One of the crucial issues in the management of State Property (BMN) is that BMN is not used efficiently, resulting in conditions where BMN is unutilized and underutilized. The concept of capital charges in the realm of public asset management can be one solution to increase the efficiency of asset use. Capital charges have been implemented in several countries, including Australia, England, New Zealand, and Canada. This study aims to analyze the possibility of applying the capital charge concept to BMN management and the prerequisites that must be met for the application of the capital charge. This study uses a qualitative approach in the form of a case study at the Directorate General of State Assets Management of the Ministry of Finance (DGSAM). DGSAM is a government agency that has the authority to formulate BMN management policies, including capital charge policies. The study results show that the capital charge concept has relevance to the concept of BMN management, especially in optimizing BMN management with a focus on cost efficiency in underutilized BMN conditions. Based on this, a capital charge can be implemented in Indonesia, but in its implementation, it is also necessary to take into account the fiscal impact from the perspective of state financial budgeting in the APBN.